

FENOMENA SOSIAL, FAKTA SOSIAL DAN FAKTA HUKUM

Subarkah¹

ABSTRACT

Legal issues are not just issue a law just because the laws have always associated with norms how someone was supposed to do or not do anything illegal, violating the law is not equal to violate moral, so that the meaning of existing law in positive law is not enough without being associated with a moral which is the 'spirit' of law so that law without “spririt” is vain. Therefore also different punishment given specially about a naughty child who can still be nurtured back to be a good boy in the criminal must not punishment, remind the principle of criminal law as an ultimum remedium

Keywords: Social Facts, Facts of Law, naughty children, Crime, Action

ABSTRAK

Persoalan hukum tidak hanya sekedar persoalan undang-undang saja karena hukum senantiasa berkaitan dengan norma-norma/kaidah-kaidah bagaimana seseorang itu seharusnya melakukan atau tidak melakukan perbuatan terlarang, melanggar hukum tidak sama dengan melanggar moral; sehingga makna hukum yang ada dalam hukum positif tidaklah cukup tanpa dikaitkan dengan moral yang merupakan “ruhnya” hukum sehingga hukum tanpa ruh adalah sia-sia. Oleh karena itu hukuman yang diberikan juga berbeda khususnya mengenai anak nakal yang masih dapat dibina agar kembali menjadi anak yang baik tidaklah harus di pidana sebagaimana asas hukum pidana sebagai ultimum remedium

Kata Kunci : Fakta Sosial, Fakta Hukum, Anak Nakal, Pidana , Tindakan

PENDAHULUAN

Banyak ungkapan yang kita dapati dalam masyarakat yang kadang terasa sinis dan menyudutkan dalam penegakan hukum di Negara kita republik Indonesia, persepsi yang demikian ini menandakan betapa sulitnya menegakkan hukum yang mengandung unsur keadilan, kepastian dan daya guna, ungkapan itu semisal “ ngono yo ngono ning ojo semono” Hakim “Hubungi Aku Kalau Ingin Menang, KHUP “ Kasih Uang Habis Perkara”, Jaksa “ Jejek Rak Iso” Advokat “ Homo Homini lopus” lepas dari persoalan itu semua kita melihat pola pendekatan para penegak hukum untuk melakukan kajian atau menjawab persoalan atau isu hukum yang terjadi dalam masyarakat, tidak sekedar dengan hukum positif melainkan dengan moral para penegak hukum untuk menghilangkan stigma yang tidak semuanya benar.

¹ Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus

Kita lihat kenyataan yang menunjukkan bahwa salah satu dampak negative kekayaan dan kemakmurn adalah merosotnya moral, kemerosotan moral ini sangat berbahaya, sebab ia akan mendorong melahirkan berbagai kejahatan dan kekerasan, oleh karenanya tidak heran bila banyak tokoh masyarakat yang menghimbau agar pemerintah dan masyarakat secara bersama-sama berjuang membangun moral dan karakter anak bangsa, bersamaan dengan itu maka hukumnyapun harus di perkuat agar lebih responsif dan masuk akal.

Akhir-akhir ini ini banyak kejadian yang sangat menggetarkan kita khususnya para orang tua yang anaknya masih remaja atau dalam dalam proses pendewasaan, khususnya berkaitan dengan perlindungan anak dan perempuan, dimana banyak kejadian anak dan perempuan diperlakukan tidak adil sesuai dengan hak-hak anak dan perempuan yang menjadi korban kekerasan dan pelecehan seksual oleh orang dewasa, atau pun oleh orang yang di kategorikan belum dewasa karena belum mencapai usia 18 tahun (delapan belas tahun) yang secara normatif dituangkan dalam pasal 1 Undang –Undang no.23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak ², akan tetapi bagaimana bila yang melakukan perbuatan yang terlarang itu adalah sama-sama anak, apakah harus dipidana keduanya?, atau salah satunya dan tentunya siapa yang dikatakan sebagai korban? Untuk itu dalam tulisan ini saya akan mengajak para pembaca untuk berkontemplasi terhadap masalah sosial sekaligus masalah hukum yang semakin banyak terjadi di masyarakat, yang kadang dianggap sebagai hal yang biasa.

PERMASALAHAN

Seperti yang penulis uraikan dalam pendahluan ,seringkali terjadi pergaulan bebas antara anak yang masih dibawah umur sering melampaui batas-batas yang ditentukan dalam norma-norma agama, sosial yang hidup dalam masyarakat bahkan terjadi perbuatan melawan hukum.

1. Bagaimanakah apabila perbuatan yang telah dilakukan (zina) telah dilakukan anak yang didasarkan suka-sama suka tetapi kemudian orang tua dari pihak perempuan tidak menerimakan dan melaporkan kepada pihak yang berwajib (polisi) ?
2. Siapakah yang dilindungi sesuai dengan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak?

² Pasal 1 angka 1 dikatakan : anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun) termasuk anak yang masih dalam kandungan

PENELITIAN HUKUM

Penulis ingin mengkaji atau meneliti sebuah fenomena menarik yang terjadi di masyarakat, dimana manusia mempunyai hubungan dengan Pribadi dan Antar Pribadi; Hubungan pribadi menyangkut hubungan manusia dengan Tuhannya dan Nuraninya sedangkan hubungan antar pribadi meliputi hubungan antara manusia yang tercakup dalam bidang sopan santun dan yang tercakup dalam bidang ketertiban yaitu hukum.

Dalam Penelitian hukum praktis persoalannya tidak terlalu rumit seperti dalam penelitian akademis, dalam penelitian hukum praktis hanyalah meliputi:³

1. Perbedaan penafsiran teks peraturan karena peraturan tidak jelas
2. Kekosongan aturan hukum
3. Perbedaan penafsiran atas fakta

Selanjutnya dikatakan :

- Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi
- Penelitian Hukum Bukan untuk menguji hipotesis ,tidak mengenal adanya *data* ,Merupakan kegiatan *know-how dalam* penerapan ilmu hukum, yaitu untuk memecahkan *isu hukum* yang timbul dan memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya
- Untuk keperluan praktek hukum hasil suatu penelitian hukum adalah preskripsi yang berupa rekomendasi atau saran akan tetapi tidak berarti bahwa saran tersebut sekedar saran,mengingat ilmu hukum merupakan ilmu terapan, saran yang dihasilkan dari penelitian harus mungkin untuk diterapkan
- Untuk kegiatan akademis,praktek hukum tidak selalu berkonotasi dengan adanya sengketa (litigasi)
- Praktek hukum dapat saja berupa telaah atas suatu kontrak tertentu, pembuatan kontrak, atau audit hukum atas perusahaan tertentu atau penyiapan naskah akademis suatu Rancangan Undang-undang
- Hasil penelitian hukum untuk keperluan praktek adalah Pendapat Hukum (*Legal Opinion*)

³ Peter Mahmud Marzuki, “*Penelitian Hukum*” Unair 2004

PEMBAHASAN

Setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab sebagai generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.

Namun sering kita melihat banyak hal kejadian pelanggaran norma-norma sosial maupun norma hukum dilakukan oleh anak yang dengan melakukan hubungan persetubuhan sebagaimana layaknya suami istri tanpa melewati perkawinan. Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan dikatakan perkawinan diperkenankan ketika anak sudah mencapai 16 tahun (untuk perempuan) dan 19 tahun (untuk laki-laki)⁴ artinya secara psikologis tingkat kedewasaan antara kaum perempuan dengan laki-laki lebih dewasa kaum perempuan.

Kejadian yang sering kita jumpai dalam masyarakat terkait dengan perbuatan terlarang yang dilakukan oleh anak (Baca:Zina) baik laki-laki maupun perempuan yang sama –sama berusia 16 tahun atau yang belum dewasa tetapi anak sudah memenuhi syarat untuk melakukan perkawinan tetapi belum dewasa menurut ketentuan dalam Undang-undang no.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan dilakukan suka sama suka akan tetapi orang tua anak perempuan tidak terima bagaimanakah sanksinya ?

Untuk menjawab permasalahan ini dikatakan mudah -ya –mudah, dikatakan susah – ya- susah artinya gampang-gampang susah karena saya katakan kedua anak yang telah “kasmaran” ini telah tersesat tetapi menikmati kesesatan itu, oleh karena itu dengan hukuman tindakan⁵ sudah cukup untuk mengembalikan mereka ke jalan yang benar, artinya tidak perlu di pidana karena hukum pidana dianggap sebagai ultimum remedium (obat terakhir) untuk memberikan sanksi, ketika sanksi lain yang di berikan tidak efektif yang dapat menimbulkan efek jera sehingga tidak mengulangi perbuatan jahat yang pernah dilakukan (taubatan nasukha)

⁴ Lihat pasal 7 ayat (1) Undang-Undang no.1 tahun 1974 tentang Perkawinan

⁵ Tindakan dalam pasal 24 ayat (1) Undang-Undang no.3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak berupa : a. mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh; b. menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja; atau c. menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja. Atau Tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat disertai dengan teguran dan syarat tambahan

Dalam Undang Undang no.3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak dikatakan :

Anak nakal adalah anak yang melakukan tindak pidana atau anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak baik menurut peraturan perundangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat⁶ . Dengan demikian ada kategori anak nakal yaitu:

1. Melakukan perbuatan pidana
2. Melakukan perbuatan yang di larang bagi anak

Sebagaimana diketahui dalam dalam Undang-Undang no. 3 tahun 1997 dikatakan khususnya Pasal 23 ayat (1) Pidana yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal ialah pidana pokok dan pidana tambahan.

Sedangkan ayat (2) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal ialah :

- a. pidana penjara;
- b. pidana kurungan;
- c. pidana denda; atau
- d. pidana pengawasan.

Sedangkan ayat (3) Selain pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terhadap Anak Nakal dapat juga dijatuhkan pidana tambahan, berupa perampasan barang-barang tertentu dan atau pembayaran ganti rugi.

Untuk ayat (4) Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pembayaran ganti rugi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 25 ayat (1) Terhadap Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, Hakim menjatuhkan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.

Sedangkan ayat (2) Terhadap Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf b, Hakim menjatuhkan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.

Apabila melakukan perbuatan pidana maka hukumannya adalah sebagaimana diatur dalam pasal 23 yaitu berupa :

- a. pidana penjara;
- b. pidana kurungan;
- c. pidana denda; atau
- d. pidana pengawasan.

⁶ Lihat pasal 1 angka 2 huruf a dan b Undang-Undang no.3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak

Pasal 26 ayat (1) Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, paling lama 1/2 (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.

Sedangkan ayat (2) Apabila Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak tersebut paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Untuk ayat (3) Apabila Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana yang diancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka terhadap Anak Nakal tersebut hanya dapat dijatuhkan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b.

Dan ayat (4) Apabila Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana yang tidak diancam pidana mati atau tidak diancam pidana penjara seumur hidup, maka terhadap Anak Nakal tersebut dijatuhkan salah satu tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.

Apabila melakukan perbuatan yang dilarang bagi anak baik menurut peraturan perundangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat maka hukumannya adalah sebagaimana diatur dalam pasal 24 yaitu berupa :

- a. mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh;
- b. menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja; atau
- c. menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.

Problema ini yang demikian ini ketika orang tua perempuan (baca:korban) oleh penyidik Kepolisian maupun Kejaksaan dalam praktek untuk anak nakal sering menggunakan/ dikenakan dakwaan alternatif:

Pertama :

Melakukan tindak pidana dengan cara melawan hukum melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, sebagaimana diatur dalam pasal 81 ayat (2)

Undang-Undang no.23 tahun 2002 Tentang Perlindungan anak

Atau

Kedua:

Melakukan tindak pidana bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya, sedang dikatehuinya atau harus patut disangkanya, bahwa umur perempuan itu belum cukup 15 tahun kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa perempuan itu belum masanya untuk kawinn , sebagaimana diatur dalam Pasal 287 ayat (1) KHUPidana.

Dalam proses hukum baik dalam penuntutan oleh jaksa maupun maupun penjatuhan putusan pemidanaan oleh hakim hanya melihat pada satu sisi peraturan perundangan yaitu Undang-Undang no.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, tanpa melihat Perundangan lain karena perbuatan yang terlarang di lakukan oleh sama-sama masih anak maka tentunya juga menggunakan Undang-Undang no.3 tahun 1997 tentang Peradilan anak, dan usia kawin sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang no.1 tahun 1974.

Kemudian marilah kita pahami bersama teori-teori pidana modern yang sekarang dianut KUHAP kita, lebih mendasarkan diri pada penghargaan hak asasi manusia, bahwa pemidanaan bertujuan untuk memperbaiki dan menginsafi diri pelaku dengan mempertimbangkan orang, perbuatan, niat (sikap batin) serta hubungan sebab akibat terjadinya perbuatan pidana. Dengan mendasarkan diri pada hukum adalah sarana mencapai kebenaran dan keadilan dengan menjunjung tinggi **hak-hak asasi manusia**. Marilah kita bersama dalam peradilan ini kita mengungkapkan kebenaran yang seadil-adilnya dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang melekat pada setiap manusia, khususnya diri para terdakwa yang juga masih anak-anak.

Oleh karena itu dalam konteks penelitian ini masalahnya bukanyaa pada Perbedaan penafsiran teks peraturan karena peraturan tidak jelas atau kekosongan aturan hukum akan tapi lebih pada perbedaan penafsiran atas fakta, apakah ini sudah menjadi fakta hukum ataukahkah masih fakta sosial atau bahkan masih menjadi fenomena sosial.

Marilah kita lihat kasusnya seakan peneliti ingin mengajak para pembaca seakan menjadi penegak hukum (Polisi,jaksa,Hakim dan Advokat) untuk berandai-andai mengadilinya dan menelaah menjadi sebuah keputusan sebagaimana diamanatkan dalam perundang-undangan yakni pancasila dimana sila pertama adalah Ketuhanan Yang maha Esa artinya setiap keputusan harus mengandung irah-irah ”Berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa”

Bahwa untuk dapat dipersalahkan melanggar ketentuan sebagaimanana Surat dakwaan Jaksa Penuntunt Umum, dalam dakwaan **Pertama:** Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang no.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak , terdakwa harus terbukti dan memenuhi unsur :

1. Setiap Orang
2. Dengan cara melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan
3. Membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain;

Ad.1. Unsur setiap orang

- Bahwa Setiap orang atau barang siapa ,artinya adresatnya adalah semua orang yang mempunyai hak dan kewajiban sehingga dikatakan sebagai subyek hukum, dimana perumusan undang-undang mengharuskan adanya unsur pribadi sebagai subyek hukum yang ada pada diri si pembuat, yang tanpa adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat dipertanggung jawabkan dalam hal hal ini adalah terdakwa, dan apabila terdakwa memenuhi rumusan tersebut maka oleh karena itu unsur **Setiap Orang ini terpenuhi.**

Ad.2. Unsur dengan cara melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan.

- Bahwa demikian juga yang di maksud dengan cara melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan haruslah dimaknai dengan melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang sehingga orang itu menurutinya untuk berbuat sesuatu.
- Bahwa demikian juga yang di maksud serangkaian kata bohong haruslah dimaknai di pakainya banyak kata-kata bohong, sedangkan satu kata bohong tidaklah cukup, oleh karena itu serangkaian kata bohong haruslah tersusun sedmikian rupa sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhan merupakan cerita sesuatu seakan-akan benar adanya.
- Bahwa sebaliknya,jika Jaksa Penuntut Umum tidak menguraikan apa yang dimaksud dengan melakukan tipu muslihat atau serangkaian kebohongan, maka rumusan dakwaan ataupun penuntutan yang demikian dapat dikatakan kabur, tidak jelas (obscur libel)
- Bahwa bila disandingkan dengan kasus yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa ,dalam keterangan Terdakwa maupun Saksi Korban Sebelum Terdakwa melakukan perbuatan terlarang dengan Saksi Korban di dahului dengan prolog dengan mengatakan “*aku seneng karo kowe*” artinya aku senang/cinta dengan kamu” dan Saksi Korban mengatakan “*aku nek meteng piye*” artinya kalau aku hamil bagaimana” maka di jawab oleh Terdakwa “*aku tanggung jawab, kowe tak nikah*”

artinya saya bertanggung jawab, kamu akan aku nikah/kawin; kemudian terkadilah perbuatan terlarang tersebut.

- Perbedaan penafsiran atas fakta demikian ini sering terjadi, apakah itu sebenarnya adalah ungkapan rasa cinta, rasa senang Terdakwa terhadap Saksi Korban dan atau perbuatan yang dikategorikan sebagai melakukan tipu muslihat, atau serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, sebagaimana di dakwakan Jaksa Penuntut Umum(JPU)
- Bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan juga keterangan Terdakwa dan Saksi Korban adalah sudah lama pacaran, dan keduanya juga sudah saling bertemu di tempat-tempat lain selain di rumah saksi
- Bahwa perbuatan terlarang yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Korban adalah suka sama suka, hal ini sesuai dengan keterangan salah satu saksi yang mengatakan sebelum kenal Saksi Korban minta dikenalkan pada Terdakwa karena saksi korban suka/senang dengan Terdakwa.
- Bahwa oleh karena itu apabila ungkapan sebagaimana dimaksud diatas antara Terdakwa dan saksi Korban dimakanai sebagai tipu muslihat /serangkaian kebohongan maka **Unsur dengan cara melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan terpenuhi** dan sebaliknya apabila dimaknai sebagai ungkapan rasa cinta, rasa senang Terdakwa terhadap Saksi Korban maka **Unsur dengan cara melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan tidak terpenuhi sama sekali.**

Ad.3. Unsur Membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain

- Bahwa demikian juga dengan unsur membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain ; membujuk melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang sehingga orang itu menurutinya untuk berbuat sesuatu dan apabila ia mengetahui permasalahannya dan akibatnya dia tidak akan berbuat demikian.
- Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi Korban sudah saling mengenal, saling pacaran, dan suka sama suka ,dan datang ke Rumah tanpa paksaan/tipu muslihat sehingga sebelum melakukan perbuatan yang dilarang tersebut , telah terjadi **prolog** dengan mengatakan “*aku seneng karo kowe*” artinya aku senang/cinta dengan kamu” dan di jawab oleh saksi korban “*aku nek meteng piye*” artinya kalau aku hamil bagaimana”

maka di jawab oleh terdakwa “*aku tanggung jawab, kowe tak nikah*” artinya saya bertanggung jawab, kamu akan aku nikah/kawin; sebenarnya itu adalah ungkapan rasa cinta, rasa senang Terdakwa terhadap Saksi Korban dan bukan melakukan tipu muslihat, atau serangkaian kebohongan, untuk melakukan persetubuhan, tetapi lebih di dasarkan suka sama suka dan saling mencintai, kecuali Terdakwa tidak bertanggung jawab.

- Bahwa oleh karena itu apabila ungkapan sebagaimana dimaksud diatas antara Terdakwa dan saksi Korban dimakanai sebagai tipu muslihat /serangkaian kebohongan maka **Unsur Membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain terpenuhi** dan sebaliknya apabila dimaknai sebagai ungkapan rasa cinta, rasa senang Terdakwa terhadap Saksi Korban maka **Unsur Membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain tidak terpenuhi sama sekali.**

Persoalan kedua siapa sebenarnya di lindungi? sebenarnya filosofis dalam perlindungan anak tentunya anak yang masih belum berumur 18 tahun (delapan belas tahun) baik korban atau Terdakwa , terutama perempuan yang karena akan melahirkan anak-anak bangsa di kemudian hari kelak oleh karena perempuan yang bagaimana yang dilindungi, yaitu perempuan yang bermoral bermartabat dan tidak bisa menga martabatnya, hal ini sejalan dengan pepatah jawa yang mengatakan “ *sedumuk batuk senyari bumi den lakoni taker pati pecahing dodo utahing ludiro*” artinya kurang lebih adalah mempertahankan martabat wanita itu dilakukan sampai titik darah penghabisan” adalah mustahil anak-anak bangsa ini akan baik bila dilahirkan dari perempuan yang tidak bermartabat dan amoral, demikian juga tidak ada dalam *AlQur’an Surat AR Rijal yang ada Surat An Nisa’* oleh karena nya agar wanita bisa menjaga martabatnya sehingga kelak melahirkan bangsa yang bermartabat.

Sebenarnya masih banyak fokus dalam perlindungan anak ini misalnya :

- Anak-anak yang dalam situasi dan keadaan darurat
- Anak –anak yang terlibat dalam masalah hukum
- Anak-anak yang menjadi korban human trafficking
- Anak dalam korban kekerasan
- Anak-anak yang berasal dari lingkungan minoritas/ marjinal

Untuk Dakwaan kedua Melakukan tindak pidana bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya, sedang dikatehuinya atau harus patut disangkanya, bahwa umur perempuan itu belum cukup 15 tahun kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa perempuan itu belum masanya untuk kawinn , sebagaimana diatur dalam Pasal 287 ayat (1) KHUPidana, untuk perbuatan anak nakal yang dilakukan suka-sama suka tidak dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum sehingga dianggap tidak tepenuhi

KESIMPULAN

1. Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang; Oleh karena itu untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak, diperlukan dukungan, baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai, oleh karena itu ketentuan mengenai penyelenggaraan pengadilan bagi anak perlu dilakukan secara khusus;
2. Sesuai faktanya Terdakwa tidak mempunyai niat jahat/mensrea untuk tidak bertanggung jawab atas perbuatannya yang semestinya tidak/belum waktunya di lakukan baik oleh Terdakwa mapun Saksi Korban dan tidak ada niat untuk melarikan diri dari tanggung jawab atas perbuatannya karena terdakwa senang/mencintai Saksi Korban meskipun tidak disetujui oleh orang tua korban
3. Keinginan Terdakwa melalaui orang tuanya untuk berdamai dengan jalan di kawinkan walaupun masih belum memenuhi syarat perkawinan sebagaimana di atur dalam pasal 7 ayat (1) UU no.1 tahun 1974 tentang perkawinan, namun tidak diterima oleh orang tuanya Saksi Korban.
4. Bahwa Perbuatan Antara terdakwa dengan Saksi Korban adalah Perbuatan yang terlarang bagi anak oleh karenanya dapat dikatakan ” perbuatan tersesat tetapi manikmati kesestan itu” oleh karena tidak perlu dipidana sebagaimana ditentukan dalam pasal 23 Undang-Undang no.3 tahun 1997 tetapi cukup untuk di berikan Tindakan sebagaimana di tentukan dalam pasal 24 Undang-undang no.3 tahun 1997 untuk mengembalikan mereka ke jalan yang benar, mengingat pidana adalah Ultimum Remedium.
5. Praktek peradilan hendaknya mempertimbangkan saran dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) yang merekomendasikan agar diberikan **hukuman berupa tindakan, yang**

ditempatkan di Dinas sosial untuk di bina, sebagai tugas-tugas BAPAS yang diatur dalam Pasal 34 Jo Pasal 56 ayat (1) UU no.3 tahun 1997 tentang peradilan anak, dan hasil penelitiannya dan harus disampaikan kepada hakim

DAFTAR PUSTAKA

Peter Mahumud Marzuki “ *Penelitian Hukum*” Unair 2004

Undang- Undang no.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang- Undang no.3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak

Undang- Undang no.8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang- Undang no.1 tahun 1974 tentang Perkawinan